

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN
KEADILAN PERPAJAKAN ATAS SENGKETA
TRANSFER PRICING PADA PENGADILAN PAJAK**

TESIS

Oleh

MOKHAMAD KHIFNI

(2302198050)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN KEADILAN
PERPAJAKAN ATAS SENGKETA TRANSFER *PRICING* PADA
PENGADILAN PAJAK**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

MOKHAMAD KHIFNI

(2302198050)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mokhamad Khifni

NIM : 2302198050

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
**"KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN KEADILAN
PERPAJAKAN ATAS SENGKETA TRANSFER PRICING PADA
PENGADILAN PAJAK":**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Mei 2025



MOKHAMAD KHIFNI
NIM: 23021980



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS
AKHIR

“KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN Keadilan
PERPAJAKAN ATAS SENGKETA TRANSFER PRICING PADA
PENGADILAN PAJAK”

Oleh:

Nama : Mokhamad Khifni

NIM : 2302198050

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang
Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program
Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

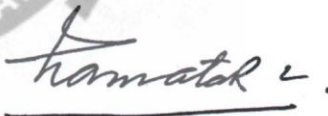
Jakarta, 15 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN: 0327096504


Dr. Ir. Serirama Butarbutar, S.E., Msi., S.H., M.H.
NIDK: 9903002023

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/ 0305097105

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Mei 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mokhamad Khifni
NIM : 2302198050
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN Keadilan Perpajakan Atas Sengketa Transfer Pricing Pada Pengadilan Pajak"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji Jabatan Dalam Tim Penguji Tanda tangan

1. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H

Sebagai Ketua

2. Dr. Ir. Serirama Butarbutar, S.E., Msi., S.H., M.H

Sebagai Anggota

3. Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M., MBA

Sebagai Anggota

Jakarta, 15 Mei 2025



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mokhamad Khifni

NIM : 2302198050

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN
KEADILAN PERPAJAKAN ATAS SENGKETA
TRANSFER PRICING PADA PENGADILAN PAJAK”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Mei 2025



MOKHAMAD KHIFNI
NIM: 2302198050

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia program Pascasarjana. Peneliti menyadari bahwa tanpa izin dari Tuhan serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K Harjono, S.H, M.H, M.B.A. selaku Rektor
2. Ibu Prof. Dr.dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku direktur program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua program studi magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan waktu selama penulis menyusun thesis sampai penulis mendapatkan gelar MH.
5. Ibu Dr. Ir. Serirama Butarbutar, SH., MH. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu dan waktu selama penulis menyusun thesis sampai penulis mendapatkan gelar MH.
6. Seluruh Dosen Pengajar Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, bapak dan ibu adalah dosen-dosen terbaik.
7. Istri dan anak-anakku yang telah memberikan dorongan untuk terselesainya tesis ini.
8. Seluruh teman-teman kelas Hukum Bisnis Pascasarjana UKI Tahun Akademik 2024/2025 yang selalu memberikan kontribusi dan masukan dukungan positif selama perkuliahan berlangsung.

Pada akhirnya peneliti memohon kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan peneliti berharap agar semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 15 Mei 2025

Hormat Saya,



Mokhamad Khifni



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Keaslian Penelitian (Orisionalitas)	24
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Kajian Pustaka Hukum Perpajakan.....	28
B. Landasan Hukum Pajak	35
C. Pengadilan Pajak.....	38
D. Sengketa Pajak.....	41
E. Banding.....	44
F. Putusan Pengadilan	46
G. Hubungan Istimewa	51
H. Tinjauan Transfer Pricing (Harga Transfer)	54
I. Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha (PKKU)	57
BAB III	63
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TERKAIT PENANGANAN TRANSFER PRICING (HARGA TRANSFER) DI INDONESIA DALAM MEMENUHI KEPASTIAN HUKUM.....	63
A. Peraturan Perpajakan Terkait Transaksi Transfer Pricing Yang Berlaku Di Indonesia	63

B. Menentukan Metode Harga Transfer (Transfer Pricing)	68
C. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle).....	79
D. Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara.....	89
E. Penerapan Teori Kepastian Hukum Dalam Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Transfer Pricing.....	92
BAB IV LANGKAH-LANGKAH OTORITAS PERPAJAKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT TRANSFER PRICING SERTA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK	98
A. Penerapan Kepastian Hukum Dalam Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Transfer Pricing.	98
B. Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak Harga Transfer (Transfer Pricing) Pada Pengadilan Pajak.	104
C. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Upaya Abuse Of Transfer Pricing Berdasarkan Perspektif hukum perpajakan Indonesia?	107
D. Pendekatan fenomenologi transendental Perpajakan Mengenai Sengketa Transaksi Transfer Pricing.....	113
E. Implikasi Kepastian Hukum Putusan Sengketa Banding Atas Transaksi Transfer Pricing	116
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji isu kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa transfer pricing pada Pengadilan Pajak Indonesia, sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan perpajakan. Transfer pricing adalah praktik penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini berpotensi disalahgunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah, sehingga berdampak pada penerimaan negara dan menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan otoritas perpajakan. Sengketa ini seringkali muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi perpajakan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh otoritas perpajakan dalam menangani sengketa transfer pricing agar mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori keadilan dari John Rawls.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan terkait transfer pricing di Indonesia masih menimbulkan multitafsir, terutama dalam penerapan metode pembandingan dan penentuan harga wajar atas transaksi afiliasi. Putusan Pengadilan Pajak juga belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak. Data perkara dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren meningkatnya jumlah sengketa transfer pricing, serta adanya disparitas dalam amar putusan, yang memperlihatkan lemahnya kepastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan keadilan perpajakan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi perpajakan yang lebih jelas dan terstandarisasi, penyusunan panduan transfer pricing nasional, serta penguatan kapasitas hakim Pengadilan Pajak dan otoritas perpajakan. Selain itu, perlu didorong pemanfaatan mekanisme non-litigasi seperti Advance Pricing Agreement (APA) dan Mutual Agreement Procedure (MAP) untuk mencegah sengketa sejak dini.

Dengan pembenahan aspek regulatif dan kelembagaan, diharapkan sistem perpajakan Indonesia mampu menjamin kepastian hukum dan adil, mendorong kepatuhan Wajib Pajak, dan menciptakan keadilan dalam hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks perpajakan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Transfer Pricing, Keadilan Perpajakan, Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak.

ABSTRACT

This study examines the legal certainty in the enforcement of tax justice concerning transfer pricing disputes adjudicated at the Tax Court in Indonesia. Transfer pricing refers to the pricing arrangements for transactions between affiliated entities within multinational corporations. Although legal, this practice can be misused to shift profits to low-tax jurisdictions, thereby reducing tax liabilities and potentially harming the state's revenue. In Indonesia, such disputes often arise due to differing interpretations of the arm's length principle, resulting in legal uncertainty for taxpayers.

The objective of this research is to analyze the extent to which Indonesia's tax legislation on transfer pricing ensures legal certainty for taxpayers and to evaluate the measures taken by tax authorities in handling such disputes in a manner consistent with the principles of justice. This study adopts a normative juridical approach, using statutory and conceptual methods. The theoretical framework is based on Gustav Radbruch's theory of legal certainty and John Rawls' theory of justice.

The findings reveal that the current regulatory framework surrounding transfer pricing is still prone to multiple interpretations, particularly regarding the selection of comparables, pricing methods, and the application of fairness in related-party transactions. Moreover, decisions issued by the Tax Court are often inconsistent, with some rulings favoring the taxpayer and others supporting the tax authority, even in cases with similar legal and factual backgrounds. This disparity contributes to a lack of predictability and legal certainty for taxpayers seeking justice.

Statistical data from 2019 to 2023 show a steady increase in the number of transfer pricing cases filed with the Tax Court, reflecting the persistent complexity and ambiguity in tax dispute resolution. The study underscores the importance of comprehensive regulatory reform, including clearer guidelines on transfer pricing, standardization of methods, and improved coordination between tax authorities and judicial institutions.

The research recommends enhancing the institutional capacity of judges and tax officials, as well as promoting preventive mechanisms such as Advance Pricing Agreements (APA) and Mutual Agreement Procedures (MAP) to minimize disputes. These reforms are crucial to ensuring a tax system that upholds fairness, legal certainty, and transparency.

Keywords: Legal Certainty, Transfer Pricing, Tax Justice, Tax Court, Tax Dispute.